

UPAYA DELEGITIMASI AMERIKA SERIKAT DI LAUT TIONGKOK SELATAN

Galih Apria

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: The South China Sea is one of the most strategic waters in the world, holding various advantages of high economic value at the international level, and is the busiest international sea lane in the world. Many international actors have interests in the region, they want to utilize energy resources that are in the South China Sea. The beginning of the sovereignty dispute in the South China Sea has existed since the 19th century. This study uses a historical approach, with a descriptive-qualitative analysis model, a type of literature study research, and data retrieval methods through documentary analysis, books, journals, reports, and internet sites. To analyze it, researchers use neo-theoretical theory to process conflict transformatively.

Abstrak: Laut Tiongkok Selatan merupakan salah satu kawasan perairan paling strategis di dunia, menyimpan berbagai keunggulan yang bernilai ekonomis tinggi di taraf internasional, serta merupakan jalur laut internasional tersibuk di dunia. Banyak aktor internasional yang memiliki kepentingan di kawasan ini, mereka ingin memanfaatkan sumber daya energi yang berada di laut Tiongkok Selatan. Awal mula sengketa kedaulatan di Laut Tiongkok Selatan ini sudah ada sejak abad ke 19. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis, dengan model analisis deskriptif-kualitatif, jenis penelitian studi kepustakaan, serta metode pengambilan data yaitu melalui analisis dokumenter, buku, jurnal, laporan, dan situs internet. Untuk menganalisisnya, peneliti menggunakan teori neorealisme untuk mengolah konflik secara transformatif.

Kata Kunci: sengketa, Laut Tiongkok Selatan, kepentingan, sumber daya energi, laut internasional

PENDAHULUAN

Laut Tiongkok Selatan¹ ialah salah satu kawasan perairan paling strategis di dunia. Dalam wawancaranya dengan CNN Indonesia pada 7 Juli 2016 lalu, Mantan Menteri Luar Negeri RI, Hassan Wirayuda mengatakan bahwa kawasan Asia-Pasifik ialah kawasan abad ini sebagai pusat perhatian atau *Center of Gravity*². Sebagai fakta, kawasan Laut Tiongkok Selatan menyimpan berbagai keunggulan yang bernilai ekonomis tinggi di taraf internasional.

Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah perairan terbesar VI (keenam) di dunia yang meliputi wilayah seluas sekitar 3,5 juta km². Hal ini membuat Laut Tiongkok Selatan sebagai jalur laut internasional tersibuk di dunia. Lebih dari setengah jalur lalu lintas

supertanker melalui kawasan ini³. Laut Tiongkok Selatan merupakan salah satu produksi ikan terbesar dunia yang tersedia untuk dikonsumsi di wilayah Asia-Pasifik.

Dari segi sumber daya mineral, eksplorasi dan produksi gas dan minyak bumi meningkat secara dramatis dalam dua dekade terakhir. Setengah dari aktivitas layar perdagangan dunia melalui garis komunikasi laut Tiongkok Selatan (SLOC) dan melalui perairan disekitar wilayah Indonesia⁴. Melalui potensi-potensi tersebut, kawasan Laut Tiongkok Selatan menjadi kawasan primadona baik bagi negara di sekitarnya, maupun negara berkekuatan besar (*Great Powers*) di dunia ini, termasuk Tiongkok. Oleh karena itu, muncul konflik perebutan wilayah dan klaim atas wilayah tersebut yang dilatarbelakangi oleh

¹ Disebut juga Laut Timur (Vietnam) dan Laut Filipina Barat (Filipina). Dikutip dari Bill Hayton. *The South China Sea: The Struggle for Power in Asia* (Yale: Yale University Press 2014) hal. xi.

² CNN Indonesia. Fokus: “sengketa Laut Cina Selatan”. Tersedia di: <cnnindonesia.com/tv/sengketa-laut-cina-selatan> [Internet] (diakses pada Desember 2016).

³ David Rosenberg, “Environmental Pollution around the South China Sea: Developing a Regional Response”. *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 21, No. 1, (April 1999) hal. 120.

⁴ Gabriel B. Collins, dkk (Ed.). *China’s Energy Strategy: The Impact on Beijing’s Maritime Policies* (Maryland: Naval Institute Press 2012) hal. 280.

berbagai motif demi kepentingan nasional negara tersebut.

Laut Cina Selatan menjadi pusat ketegangan di kawasan Asia Timur sejak tahun 2009. Banyak aktor internasional yang memiliki kepentingan yang berbeda disini, mereka ingin memanfaatkan sumber daya energi yang berada di Laut Tiongkok Selatan tersebut⁵. Secara historis, posisi Laut Tiongkok Selatan sudah menjadi sorotan. Sebelum masa penjajahan pada abad XVI, kawasan ini telah digunakan sebagai rute perdagangan laut oleh orang Persia, Arab, India, Tiongkok dan masyarakat Asia Tenggara⁶. Inggris, Perancis, Belanda dan Spanyol memasuki Laut Cina Selatan dengan tujuan membangun stasiun perdagangan dan pemasok SDA di kawasan itu. Hal tersebut diejawantahkan dengan pembagian wilayah pesisir menjadi lingkungan pengaruhnya masing-masing, yaitu Malaya, koloni Kalimantan Utara dan Hongkong (Inggris); Indo-Tiongkok (Perancis); Hindia Timur (Belanda-Portugis); dan Filipina (Spanyol)⁷.

Relevan dengan zaman kolonial, para kekuatan besar dunia abad XXI juga memiliki hasrat yang sama, seperti Amerika Serikat (AS), Korea Selatan, Jepang, Rusia, India dan Australia. Ketika negara-negara tersebut memiliki kepentingan tertentu, mereka tidak mengklaim hak atas wilayah manapun di Laut Tiongkok Selatan. Mereka lebih menegaskan kebebasan atas laut dan pengelolaan konflik yang berjalan damai⁸. Sejak tahun 1969, telah terjadi sepuluh perjanjian resmi yang dinegosiasikan terkait dengan Laut Cina Selatan, namun klaim tersebut saling tumpang tindih karena melibatkan beberapa negara⁹.

Berbeda dengan kekuatan besar di atas, sengketa di kawasan Laut Tiongkok Selatan bergulir sejak klaim historis atas wilayah itu. Pada Desember 1947, pemerintah Republik Tiongkok (ROC, sekarang PRC) menerbitkan peta resmi dan memperkenalkannya untuk pertama kali¹⁰. Pada peta tersebut, muncul garis berbentuk huruf U atau disebut *U-shaped Line* dengan sembilan garis putus-putus atau disebut *nine-dash Line/nine-dotted Line*¹¹. Garis tersebut melintang di sepanjang wilayah pesisir kawasan Laut Tiongkok Selatan membentuk huruf U. Kemunculan tersebut bukanlah suatu yang tiba-tiba, namun berdasarkan alasan historis. Secara historis, Tiongkok mengklaim bahwa kawasan Laut Tiongkok Selatan merupakan kedaulatannya, terutama wilayah *U-shaped Line*. Tiongkok menyatakan bahwa kawasan tersebut tergabung dalam Zona Nelayan Tradisional mereka atau *Traditional Fishing Zone/Ground* (TFZ). Namun, pengakuan Tiongkok tersebut tidak diakui oleh Konferensi PBB tentang Hukum Laut Internasional (UNCLOS¹² III) dan pihak manapun karena menurut UNCLOS III zona tersebut hanya berjarak 2 mil dari daratan negara.

Sejarah sengketa kedaulatan di Laut Cina Selatan pada mulanya dimulai sejak abad ke 19. Pihak-pihak yang bersengketa sering sekali menggunakan artefak dan dokumen kuno sebagai dasar argumen mereka tentang kepemilikan perairan tersebut¹³. Sengketa ini dimulai ketika Tiongkok menyatakan dua klaimnya atas kawasan Laut Tiongkok Selatan. Pertama, klaim kedaulatan atas pulau-pulau. Kedua, klaim yurisdiksi atas ruang maritim di kawasan itu¹⁴. Melalui klaim tersebut, Tiongkok mene-

⁵ Lyle Goldstein. "Chinese Naval Strategy in the South China Sea: An Abundance of Noise and Smoke, but little Fire". Institute of Southeast Asian Studies, Vol. 33 No. 3, 2011. Hal. 321

⁶ Jing Huan dan Andrew Billo (Ed.). *Territorial Disputes in The South China Sea: Navigating Rough Waters* (New York: Palgrave MacMillan 2015) hal. 15.

⁷ *Ibid.*, hal. 16

⁸ Enrico Fels. *Power Politics in Asia's Contested Waters: Territorial Disputes in the South China Sea* (New York: Springer 2016). hal. 29-30.

⁹ Ramses Amer. "The South China Sea: Achievements and Challenges to Dispute Management". University of California Press, Vol. 55 No. 3, 2015. Hal. 619.

¹⁰ Peter Kien-hong Yu. *Ocean Governance, Regimes, and the South China Sea Issues: A One-dot Theory Interpretation* (New York: Springer 2015) hal. 207.

¹¹ *Nine-dashed line* atau *jiudianxian* yang muncul dalam peta Tiongkok yang resmi menghasilkan ambiguitas. Garis tersebut pada mulanya digambar pada tahun 1930an yang muncul pada peta Republik Tiongkok (RoC) pada 1947 dan RRC sejak 1949. Dikutip dari: Taylor Fravel, "China's Strategy in the South China Sea". *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 33, No. 3, (Desember 2011) halaman 294-295.

¹² United Nations Convention of Law on Sea

¹³ Tonneson, Stein. "Why are the Disputes in the South China Sea so Intractable? A Historical Approach". Brill, Vol 30 No. 3, 2002. Hal. 572

tapkan empat gugusan pulau, yaitu Paracel, Spratly, Pratas dan Macclesfield Bank. Paracel dan Spratly menjadi kelompok pulau yang memiliki dampak yang lebih signifikan dan langsung bersinggungan dengan Zona Ekonomi Eksklusif beberapa negara ASEAN.

Potensi konflik muncul dalam klaim teritorial yang dilakukan oleh Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Filipina dan Brunei. Tiongkok, Vietnam dan Taiwan mengklaim keseluruhan karang, terumbu dan pulau-pulau di gugusan pulau Spratly. Sejak tahun 1940an, Taiwan, Cina, Vietnam dan Malaysia memiliki pasukan untuk ditempatkan dan membangun penanda batas serta stasiun pengamatan cuaca di pulau-pulau sekitar Laut Cina Selatan¹⁵. Filipina mengklaim pulau-pulau kecil di gugusan tersebut. Malaysia mengklaim tujuh pulau-pulau kecil yang termasuk dalam batas garis kontingen sementara Brunei mengklaim 200 mil ZEE yang mencakup Rifleman Bank di gugusan Spratly dan wilayah kecil di Filipina¹⁶. Gugusan Paracel diklaim oleh Tiongkok, Vietnam dan Taiwan.

Dalam dialog kedua dengan CNN Indonesia pada Juli 2016, Hassan Wirayuda menanggapi perbuatan Tiongkok membangun pulau buatan atau reklamasi. Ia mengatakan bahwa hal ini merupakan kebijakan yang disengaja untuk memperkuat apa yang disebut pendudukan efektif atau *Effective Occupation*¹⁷. Upaya yang dilakukan AS adalah melemahkan pendudukan efektif Tiongkok terhadap *Land* (pulau), *Reef* (karang) dan *Rock* (terumbu) tersebut.

Menanggapi keputusan tersebut, Washington (Amerika Serikat) mendesak negarane-negara yang bersengketa untuk mengklarifikasi klaim mereka sesuai dengan hukum interna-

sional. Meskipun Amerika Serikat tidak termasuk dalam 66 negara yang meratifikasi UNCLOS, namun AS secara sukarela mematuhi prinsip-prinsip dasar UNCLOS III 1982. Tiongkok sebagai penandatangan UNCLOS III 1982 mengkritisi AS yang ikut campur dalam hukum laut internasional¹⁸. Adanya keterlibatan Amerika Serikat telah mengubah situasi dan menghapuskan strategi Tiongkok untuk menegaskan kontrol di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok sadar akan risiko tekanan militer dari negara-negara ASEAN yang dekat dengan Amerika Serikat. Peningkatan akses Amerika Serikat di ASEAN akan membantu implementasi strategi militer Amerika Serikat untuk memblokir angkutan laut Tiongkok¹⁹.

Diplomasi dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan telah mendominasi aksi Amerika Serikat di Asia Tenggara. Dimulai dengan pertemuan ARF pada Juli 2010, administrasi Obama memutuskan untuk memainkan peran penting dalam mempromosikan upaya resolusi sengketa di Pulau Spratly. Pada waktu tersebut, Sekretaris Negara Hillary Clinton menyampaikan bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan nasional dalam kebebasan navigasi, membuka akses jalur maritim Asia dan menghargai hukum laut²⁰.

Amerika Serikat langsung melakukan upaya delegitimasi di kawasan tersebut. Salah satunya ialah pada 5 Maret 2016²¹ kapal induk Angkatan Laut AS, *USS John C Stennis*, dikabarkan sedang berlayar menuju Laut Tiongkok Selatan. Kapal ini didampingi kapal penjelajah *USS Mobile Bay* dan kapal perusak *USS Stockdale* dan *USS Chung-hoon*. Doss, sebagai juru Armada Pasifik AS mengatakan

¹⁴ Chi-Kin Lo. *China's Policy Towards Territorial Disputes: The Case of the South China Sea Islands* (London: Routledge 2005) hal. 25.

¹⁵ Daojiong Zha. "Security in the South China Sea". Sage Publications, Inc, Vol 26 No. 1, 2001. Hal. 35

¹⁶ *Op. Cit.*, Collins, hal. 281

¹⁷ Pendudukan efektif atau *effective occupation* atau *Uti Possidetis* ialah istilah yang digunakan dalam hukum internasional untuk menyatakan bahwa pihak atas perjanjian tertentu menguasai kepemilikan yang dicaploknya selama konflik. Dikutip dari Jeffrey Lehmann dan Shirelle Phelps (Ed.). *West's Encyclopedia of American Law*. Edisi Kedua (Drake: Gale Group Inc 2005) hal. 188.

¹⁸ Li Mingjiang dan Kalyan Kumburi (Ed.). *New Dynamics in US-China Relations: Contending for the Asia-Pacific* (London: Routledge 2015) hal. 116.

¹⁹ Leszek Buszynski, "ASEAN, The Declaration on Conduct, and the South China Sea". *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 25, No. 3, (Desember 2003) hal. 353.

²⁰ Sheldon Simon, "Conflict and Diplomacy in the South China Sea: The View from Washington". *Asian Survey*, Vol. 52, No. 6, (November/Desember 2012) hal. 1002.

²¹ Kompas. Fokus: "Laut Tiongkok Selatan". 2016. Tersedia di: <<http://internasional.kompas.com/read/2016/03/05/17534011/AS.Kirim.Kapal.Induk.dan.3.Kapal.Perang.ke.Laut.China.Selatan>> [Internet] (diakses pada 15 Desember 2016).

bahwa kapal induk itu berlayar dalam tugas rutin dan akan secara reguler berpatroli di kawasan yang bersengketa itu. Amerika Serikat sempat bebas berpatroli di sekitar pulau yang dikuasai Tiongkok, hingga membuat Beijing marah. Penyebabnya, Tiongkok telah meningkatkan pertahanan militernya di sana²². Selain itu, Amerika Serikat menjalin kerjasama dengan negara-negara ASEAN yang terlibat terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan. Implementasi kerjasama ini mencakup dialog yang berkaitan tentang pertahanan dan keamanan maupun kunjungan dan latihan militer di kawasan Laut Tiongkok Selatan²³.

Paparan di atas membenarkan eksistensi sistem bipolar. Di kawasan Laut Tiongkok Selatan, bipolaritas terjadi dalam suatu kawasan. Sistem bipolar, menurut Kenneth Waltz, akan lebih stabil dibandingkan dengan multipolar. Dengan adanya keterlibatan AS dalam sengketa tersebut, maka akan menyebabkan kestabilan di kawasan tersebut. Kestabilan tersebut dimulai ketika Tiongkok, dengan kepentingannya, meningkatkan pengembangan infrastruktur sipil dan militer di pulau reklamasinya.

METODE

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini lebih mengarah pada penggunaan model penelitian kualitatif-deskriptif. Model penelitian kualitatif adalah strategi penelitian yang menekankan kedekatan dengan data, partisipasi dan pengalaman.²⁴ Penelitian ini menekankan pengumpulan fakta dan identifikasi data. Komponen metode dalam penelitian ini adalah mendeskripsi, menganalisa, dan menafsirkan temuan dalam istilah yang jelas dan tepat.²⁵

²² Kompas. Fokus: "Laut Tiongkok Selatan". 2016. Tersedia di: <<http://internasional.kompas.com/read/2016/07/20/20015571/pasukan.as.akan.tetap.beroperasi.di.laut.china.selatan>> [Internet](diakses pada tanggal 13 Desember 2016).

²³ *Op. Cit.* Li Mingjiang dan Kalyan Kumburi (Ed.) hal. 398

²⁴ Bruce A. Chadwick, Howard M. Bahr, & Stan L. Albrecht. *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*. Edisi Terjemahan. Diterjemahkan oleh Sulistia, Yan Mujiyanto, Ahmad Sofwan dan Suhardjito, Prentice Hall International Inc., New Jersey, 2007, hal. 488.

²⁵ Lexy Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hal. 112.

²⁶ *Ibid.*, hal. 114.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumenter guna mengungkapkan informasi-informasi yang ada dalam bidang kajian tertentu.²⁶ Secara lebih khusus, analisis dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis sitiran berupa kajian bibliografi dengan mengemukakan karakter literatur berupa jenis dan bahasa literatur, peringkat pengarang dan jurnal, serta subjek bidang ilmu politik dikaji dengan analisis subjek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontestasi kekuatan besar atau *Great Power* di Laut Tiongkok Selatan memiliki ciri yang identik dengan fenomena Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ciri yang identik ini tergambar pada sasaran atau objek yang mempengaruhi situasi global atau kawasan, yaitu stabilitas. Meskipun tengah bersengketa, Laut Tiongkok Selatan mengalami stabilitas atau tidak adanya konflik karena adanya intimidasi dari Amerika Serikat. Intimidasi ini dilakukan dengan cara sekuritisasi atau upaya siap siaga atau menebar ancaman. Tujuan dari upaya ini ialah Amerika Serikat ingin menunjukkan bahwa Laut Tiongkok Selatan merupakan kawasan internasional dan bebas dilayari baik laut maupun udara.

Struktur anarki kawasan Laut Tiongkok Selatan menyebabkan desentralisasi antar-negara. Meskipun Amerika Serikat merupakan negara *Great Power* yang dianggap sepadan menghadapi Tiongkok, namun sejatinya Amerika Serikat tidak menjadi tameng atau pelindung bagi negara-negara ASEAN lain dalam menyelesaikan konflik. Hal ini dapat dilihat dari motivasi Amerika Serikat yang ingin mempertahankan kepentingan navigasinya meskipun bukan negara yang menandatangani atau meratifikasi UNCLOS III 1982. Desentralisasi ini kemudian menyebabkan muncul pergesekan kepentingan antar negara besar yang memiliki kepentingan yang sama baik dari segi tujuan maupun motif yang mendorongnya, yaitu antara Tiongkok dan Amerika Serikat.

Potensi peperangan atau *clash* di kawasan Laut Tiongkok Selatan sangat dimungkinkan. Hal ini dikarenakan kawasan tersebut masih dinilai sebagai perairan internasional secara legal. Oleh karena itu, kondisi anarki sangat mungkin untuk terwujud. Meskipun peperangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok bisa saja terjadi, namun hingga keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional 2016 lalu belum ada upaya benturan fisik atau militer yang dilakukan Amerika Serikat. Satu-satunya upaya yang dilakukan ialah sekuritisasi dan mengklaim bahwa kawasan tersebut merupakan perairan internasional. Karena kondisi ini, peneliti menyebutkan bahwa terjadi sistem bipolar dalam kawasan Laut Tiongkok Selatan. Meskipun Amerika Serikat hanya pihak ketiga yang terlibat, namun upaya sekuritisasi yang dilakukan dapat menggambarkan upaya perlindungan bagi negara-negara ASEAN yang terlibat atau *Claimant*. Oleh karena itu, stabilitas lebih realistis di kawasan tersebut.

Disamping kepentingan akan kebebasan navigasi, terdapat aspek normatif perlakuan Amerika Serikat terhadap Tiongkok. Amerika Serikat masih menilai Tiongkok sebagai mitra untuk menghadapi Korea Utara. Hal ini kemudian menyebabkan Amerika Serikat tidak secara langsung menggunakan kekuatan militer untuk mencegah pendudukan efektif Tiongkok disana. Benturan kekuatan besar antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak begitu deras dikarenakan adanya kepentingan bersama terhadap hal lain.

Berdasarkan paparan analisis di atas, peneliti menemukan bahwa upaya delegitimasi Amerika Serikat terhadap Tiongkok dilakukan hanya dalam bentuk intimidasi dan ancaman. Hal ini dikarenakan Tiongkok, dalam hal lain, merupakan *partner* Amerika Serikat untuk menghadapi nuklir Korea Utara. Namun disamping itu, terwujudnya stabilitas di kawasan Laut Tiongkok Selatan dengan tidak adanya konflik langsung yang melibatkan Tiongkok, Amerika Serikat maupun negara-negara lain sebagai *Claimant*.

SIMPULAN

Cina telah melakukan klaim terhadap keseluruhan wilayah Laut Tiongkok Selatan, sehingga dari klaim tersebut menimbulkan sengketa terhadap negara lain yang berada pada wilayah Laut Tiongkok Selatan juga. Cina melakukan klaim ini berlandaskan pada historis. Sehingga Cina dengan mantap mengklaim bahwa keseluruhan Laut Tiongkok Selatan tersebut adalah miliknya. Cina sudah jelas melanggar UNCLOS dengan melakukan kegiatan di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Dalam sengketa ini, terdapat peran Amerika Serikat, terhadap pendudukan efektif Tiongkok yang dilakukan Cina. Amerika Serikat ingin Cina untuk mematuhi Hukum Laut internasional. Jelas terlihat bahwa Cina dengan sengaja melakukan tindakan yang melanggar UNCLOS tersebut. Upaya yang dilakukan Amerika Serikat adalah untuk sekuritisasi wilayah Laut Tiongkok Selatan, yang berarti merupakan bentuk dari mawas diri yang sifatnya untuk menebak ancaman dengan melakukan patroli udara maupun laut.

DAFTAR RUJUKAN

- Amer, Ramses. *"The South China Sea: Achievements and Challenges to Dispute Management"*. University of California Press, Vol. 55 No. 3, 2015. Halaman 619.
- Buszynski, Leszek, "ASEAN, The Declaration on Conduct, and the South China Sea". *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 25, No. 3, (Desember 2003) halaman 353.
- Collins, Gabriel B, dkk (Ed.). *China's Energy Strategy: The Impact on Beijing's Maritime Policies* (Maryland: Naval Institute Press 2012) halaman 280.
- Chadwick, Bruce A, Howard M. Bahr, & Stan L. Albrecht. *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*. Edisi Terjemahan. Diterjemahkan oleh Sulistia, Yan Mujianto, Ahmad Sofwan dan Suhardjito, Prentice Hall International Inc., New Jersey, 2007, hal. 488.
- CNN Indonesia. Fokus: *"sengketa Laut Cina Selatan"*. Tersedia di: <cnnindonesia.com/tv/sengketa-laut-Cina-selatan>

- [Internet] (diakses pada Desember 2016).
- Fels, Enrico. *Power Politics in Asia's Contested Waters: Territorial Disputes in the South China Sea* (New York: Springer 2016) halaman 29-30
- Fravel, Taylor, "China's Strategy in the South China Sea". *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 33, No. 3, (Desember 2011) halaman 294-295.
- Furchan Arif. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 383.
- Goldstein, Lyle. "Chinese Naval Strategy in the South China Sea: An Abundance of Noise and Smoke, but little Fire". *Institute of Southeast Asian Studies*, Vol. 33 No. 3, 2011. Halaman 321
- Hayton, Bill. *The South China Sea: The Struggle for Power in Asia* (Yale: Yale University Press 2014) halaman xi.
- Huan, Jing dan Billo Andrew (Ed.). *Territorial Disputes in The South China Sea: Navigating Rough Waters* (New York: Palgrave MacMillan 2015) halaman 15.
- Kompas. Fokus: "Laut Tiongkok Selatan". 2016. Tersedia di: <<http://internasional.kompas.com/read/2016/03/05/17534011/AS.Kirim.Kapal.Induk.dan.3.Kapal.Perang.ke.Laut.China.Selatan>> [Internet] (diakses pada 15 Desember 2016).
- Kompas. Fokus: "Laut Tiongkok Selatan". 2016. Tersedia di: <<http://internasional.kompas.com/read/2016/07/20/20015571/pasukan.as.akan.tetap.beroperasi.di.laut.china.selatan>> [Internet] (diakses pada tanggal 13 Desember 2016).
- Lo, Chi-Kin. *China's Policy Towards Territorial Disputes: The Case of the South China Sea Islands* (London: Routledge 2005) halaman 25.
- Lehmann, Jeffrey dan Phelps, Shirelle (Ed.). *West's Encyclopedia of American Law*. Edisi Kedua (Drake: Gale Group Inc 2005) halaman 188.
- Mingjiang Li dan Kemburi Kalyan (Ed.). *New Dynamics in US-China Relations: Contending for the Asia-Pacific* (London: Routledge 2015) halaman 116.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hal. 112.
- Rosenberg, David, "Environmental Pollution around the South China Sea: Developing a Regional Response". *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 21, No. 1, (April 1999) halaman 120.
- Simon, Sheldon. "Conflict and Diplomacy in the South China Sea: The View from Washington". *Asian Survey*, Vol. 52, No. 6, (November/Desember 2012) halaman 1002.
- Tonneson, Stein. "Why are the Disputes in the South China Sea so Intractable? A Historical Approach". *Brill*, Vol 30 No. 3, 2002. Halaman 572
- Yu, Peter Kien-hong. *Ocean Governance, Regimes, and the South China Sea Issues: A One-dot Theory Interpretation* (New York: Springer 2015) halaman 207.
- Zha, Daojiong. "Security in the South China Sea". *Sage Publications, Inc*, Vol 26 No. 1, 2001. Halaman 35.